KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN

2023

PERDA DIY NO. 5, LD 2023/NO. 5, 117 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 31 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perdais DIY No. 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perdais DIY No. 1 Tahun 2015.

- Dalam peraturan ini diatur mengenai: pengelola Keuangan Daerah; APBD; penyusunan rancangan APBD; penetapan APBD; pelaksanaan dan penatausahaan; laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah; penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; kekayaan Daerah dan Utang Daerah; BLUD; penyelesaian kerugian Keuangan Daerah; informasi Keuangan Daerah; pembinaan; dan pengawasan. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, keadilan, kepatuhan, manfaat, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Gubernur selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan berwenang menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; mengajukan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; menetapkan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Gubernur wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2023.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah Dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pemerintah Kalurahan; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.

- Pergub sebagai pelaksanaan Perda ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Perda ini diundangkan.